

PENGANTAR

Quo Vadis Ilmuwan Sosial di Indonesia?

Ilmuwan sosial di Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada satu persoalan mendasar, yaitu rendahnya kontribusi pengetahuan di tingkat dunia. Dibandingkan dengan kondisi di negara tetangga, jumlah publikasi internasional rumpun ilmu sosial di Indonesia masih memprihatinkan. Data dari *Scimago Journal Rank* 2014 menunjukkan bahwa jumlah publikasi internasional ilmuwan sosial Indonesia sebanyak 488 artikel, jauh di bawah Malaysia (2.056), Singapura (1.160), dan Thailand (585). Hal ini seturut dengan fakta bahwa sebagian besar karya akademik tentang Indonesia ditulis oleh orang asing yang berada di pusat-pusat studi Asia seperti di Australia, Amerika, Jepang, Belanda, dan Kanada.

Sejalan dengan rendahnya jumlah publikasi ilmiah internasional, para akademisi dan peneliti ilmu sosial di Indonesia jauh lebih mudah tergiur dengan selebritisasi media massa. Tampil di televisi bersama para politisi dan pejabat atau munculnya komentar di berbagai media cetak dan *online* seringkali dipandang sebagai ukuran keberhasilan menjadi intelektual publik.

Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena selain memperoleh honor pada saat tampil di televisi, menjadi populer sebagai intelektual selebritas merupakan modal untuk memperoleh tawaran pekerjaan sebagai konsultan partai politik, lembaga donor atau bahkan sebagai pejabat publik. Pada segi tertentu, interaksi ilmuwan sosial dengan publik secara luas memang diperlukan, terutama dalam konteks untuk memberikan penjelasan atau mengemansipasi masalah berdasarkan keahlian tertentu. Namun, dalam kenyataannya banyak pandangan yang dikemukakan melalui berbagai media massa tidak didasarkan atas hasil riset yang serius, terlebih yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi internasional. Parahnya lagi, banyak akademisi pengamat politik

yang bisa mengomentari berbagai topik dan terkesan sebagai ahli segala hal. Semakin menjamurnya media *online* yang mengutamakan kecepatan penyampaian informasi nampaknya juga memfasilitasi kehadiran intelektual selebritas itu.

Terdapat satu pandangan bahwa kondisi di atas terjadi di antaranya karena tidak memadainya sistem remunerasi yang dapat mendorong penelitian berkesinambungan berstandar internasional. Akibatnya, wajar fenomena intelektual selebritas mengemuka serta lebih banyak riset berorientasi proyek sementara kontribusi akademik pada kepustakaan tingkat dunia minim. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenristekdikti sebenarnya telah banyak menggelontorkan dana penelitian serta insentif untuk publikasi pada jurnal bereputasi internasional. Faktanya, jumlah publikasi internasional rumpun ilmu sosial di Indonesia sejak adanya kebijakan mengenai kewajiban publikasi tahun 2011 hingga 2014 hanya meningkat sebanyak 200-an artikel. Bandingkan dengan Malaysia yang meningkat hingga 500-an artikel atau di India hingga 1000 lebih artikel pada kurun waktu yang sama (lihat *Scimago Journal Rank* 2014).

Kebijakan serupa sebenarnya juga telah dibuat oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya dengan memberikan insentif atas publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional. Akan tetapi, tanpa disertai upaya membangun kultur penelitian dan penulisan yang serius di kalangan dosen, kebijakan semacam ini belum terlihat keberhasilannya. Menurut penulis, ada dua alasan utama rendahnya kontribusi ilmuwan sosial Indonesia di dunia. Pertama, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari proses birokratisasi era Orde Baru yang membuat orientasi produksi pengetahuan sekadar melayani kepentingan negara dan industri. Karir sebagai akademisi juga diukur bukan dari kuantitas dan kualitas publikasi yang dihasilkan, terlebih yang bertaraf internasional, melainkan dari capaian jabatan struktural yang dapat diraih.

Untuk meraih jabatan tersebut juga tidak didasarkan atas produktivitas akademik, melainkan dari kedekatan hubungan dengan pejabat di atasnya. Situasi serupa hingga kini masih terjadi

di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini tercermin dari tuntutan kerja di perguruan tinggi yang lebih menempatkan dosen sebagai pegawai ketimbang sebagai akademisi dan intelektual.

Kedua, akibat warisan birokratisasi pengetahuan tersebut, tradisi akademik yang terbentuk di berbagai perguruan tinggi di Indonesia cenderung insular, merasa puas dengan dirinya sendiri serta bersikap anti-kritik. Padahal, prinsip utama produksi pengetahuan mempersyaratkan dikemukakannya argumen yang dibangun atas kritik terhadap pandangan yang ada. Sayangnya, di lingkungan akademik sekalipun mengkritik masih dianggap kurang pantas, apalagi jika ditujukan pada seseorang yang dianggap lebih senior.

Sebagian besar tulisan yang terpublikasi pada jurnal-jurnal nasional, terutama yang belum terakreditasi, misalnya, hanya berisi paparan teori atau sekadar deskripsi data karena tidak adanya unsur kritik sebagai pintu masuk kontribusi akademik secara luas. Hal ini membuat jangkauan resonansi tulisan atau yang biasa disebut sebagai *impact factor* menjadi sangat terbatas. Kualitas demikian tentu jauh dari standar tulisan dalam jurnal bereputasi internasional yang juga mempersyaratkan adanya proses telaah secara anonim. Proses telaah semacam itu, yang memungkinkan sebuah manuskrip diuji terlebih dahulu koherensi logika argumennya oleh mitra bebestari sebelum dinyatakan layak dipublikasikan, juga belum bisa diterima secara jamak di lingkungan akademik.

Hal tersebut juga tercermin dari banyaknya karya ilmiah mahasiswa mulai jenjang S1 hingga S3 bahkan laporan-laporan riset para dosen yang masih memiliki kontribusi teoritis dan praktis yang rendah karena umumnya tidak ada argumen yang dikemukakan. Tradisi akademik semacam ini pada akhirnya membentuk sosok ilmuwan sosial di Indonesia sekadar sebagai pengrajin data, sementara yang menafsirkan data tersebut adalah para ilmuwan asing. Dengan demikian, wajar bahwa sebagian besar karya akademik tentang Indonesia ditulis oleh orang asing.

Atas persoalan tersebut, paling tidak ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini. Pertama, produksi pengetahuan harus dipisahkan dari proses birokratisasi kekuasaan. Perlu dipertegas

bahwa tugas utama dosen dan peneliti adalah sebagai akademisi dan intelektual, ketimbang sebagai pegawai, dan karena itu lebih seharusnya dituntut memberikan kontribusi pengetahuan secara teoretis dan sumbangsih praktisnya kepada masyarakat. Secara institutional, sistem penilaian kinerja dosen di bidang ilmu sosial selayaknya diutamakan berdasarkan capaian jumlah publikasi yang telah dihasilkan. Namun, harus dicatat bahwa kualitas publikasi mesti didasarkan atas proses telaah oleh mitra bebstari secara anonim, tidak hanya terhadap artikel jurnal tetapi juga untuk naskah buku.

Kedua, tradisi berpikir kritis di lembaga pendidikan penting untuk dikembangkan sebagai dasar untuk membangun interaksi akademik secara lebih luas. Di jenjang pendidikan dasar, siswa dapat dilatih agar terbiasa mengemuakan argumen dan menilai sesuatu secara kritis. Di jenjang pendidikan tinggi, upaya semacam itu paling tidak bisa dimulai dengan mengubah teknik dan orientasi penulisan ilmiah, dari sekadar berorientasi memaparkan data atau menafsirkan teori menjadi tulisan yang argumentatif.

Abdil Mughis Mudhoffir

Dosen Jurusan Sosiologi, FIS, Universitas Negeri Jakarta
Kandidat PhD, Asia Institute, University of Melbourne